



PENGEMBANGAN PERBUKUAN NASIONAL

dalam
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II
(PJPT II)

XI. 117

n Direktorat
budayaan

.2
N

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional
Jakarta



075/2
PEN

PENGEMBANGAN PERBUKUAN NASIONAL

**dalam
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II
(PJPT II)**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional
Jakarta
1993**

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi oleh Undang-Undang

**Milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Diperdagangkan**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENGEMBANGAN Perbukuan Nasional dalam
Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II)/
Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional --
Cet. 1 -- Jakarta: Badan Pertimbangan Pengembangan
Buku Nasional, 1993.

v, 39 hal.; 21 cm.

ISBN 979 462 414 4

1. BUKU DAN PERBUKUAN-INDONESIA

**I. Badan Pertimbangan Pengembangan Buku
Nasional**

070.5

Cetakan I : 1993
Disusun dengan huruf : Tiempo
Diproduksi oleh : Pusat Perbukuan
Dicetak oleh : CV. Dwi Cahaya Citra Prima
ISBN : 979 462 414 4

PENGANTAR

Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) dibentuk dengan keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1978. Tugas pokok BPPBN adalah untuk menelaah secara nasional seluruh masalah perbukuan dengan jalan menilai serta memberikan saran dan pertimbangan guna dijadikan dasar bagi penentuan kebijaksanaan pemerintah.

Pada awal tahun 1994 Pelita V akan berakhir. Pada saat itu pula berakhirilah program Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) yang akan disusul dengan program Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II).

Mengingat pentingnya peranan buku sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan sebagai sumber informasi bagi pelaksanaan pelbagai sektor pembangunan, maka pengembangannya perlu dilaksanakan secara terarah dan mengacu kepada kepentingan pembangunan.

Untuk itu Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) telah berusaha untuk menyusun gagasan tentang arah kebijaksanaan pengembangan perbukuan nasional dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II), seperti tertuang dalam buku ini.

Maksud dan tujuan penerbitan buku ini adalah untuk disampaikan sebagai saran kepada pemerintah bagi penyusunan kebijaksanaan di bidang pengembangan perbukuan, dan sekaligus sebagai sumber informasi bagi masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang perbukuan.

Jakarta, 1992
Badan Pertimbangan Pengembangan
Buku Nasional

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kebutuhan Akan Bahan Bacaan	5
BAB III Keadaan Perbukuan Nasional pada Akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) I) dan Permasalahannya	9
A. Pengadaan	9
B. Penyebaran Buku dan Bahan Pustaka lainnya	18
C. Pemanfaatan Buku dan Bahan Pustaka lainnya	19
D. Pengaturan Buku dan Bahan Pustaka lainnya	20
BAB IV Arah dan Langkah-Langkah Pengembangan Perbukuan Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II)	25
A. Arah dan Sasaran Pengembangan	25
B. Langkah-langkah Pengembangan	25
BAB V Penutup	35
Lampiran: Daftar Anggota Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional	36

BAB I

PENDAHULUAN

Buku selain merupakan sarana yang ampuh untuk melestarikan hasil budaya, juga merupakan wahana informasi ilmu pengetahuan yang sangat berdayaguna. Sekalipun dalam abad ke-20 ini media elektronika telah maju dengan pesat, buku merupakan sarana penyebar informasi yang paling populer, karena buku lebih sederhana, lebih tahan lama, mudah disimpan, dan dalam penggunaannya tidak memerlukan alat pembantu. Oleh karena itu, buku senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pendidikan, penerangan, penelitian, pengembangan ilmu, dan teknologi, serta peningkatan kebudayaan bangsa.

Republik Indonesia merupakan negara yang baru lahir sesudah perang dunia ke dua, terdiri atas ribuan pulau, besar dan kecil, dengan luas seluruhnya \pm 5.193.250 Km². Dari seluruh wilayah Indonesia tersebut 2.027.087 Km² merupakan daratan dan 3.166.163 Km² perairan laut. Penduduk Indonesia lebih dari 180.000.000 orang, sangat majemuk dalam pola budaya dan tingkat kecerdasan, dan lebih kurang 20% berdiam di kota-kota sedang yang 80% lainnya berada di daerah pedesaan.

Pada waktu rakyat Indonesia menyatakan diri merdeka, salah satu penggerak tindakan rakyat ini adalah keinginan yang maha besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keinginan yang maha besar ini dianggap sedemikian penting sehingga dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945.

Jelas kiranya, bahwa untuk memenuhi keinginan rakyat ini, buku dan bahan pustaka lainnya perlu dikembangkan secara terus-menerus, dalam jumlah dan mutu yang memadai, tersebar luas di kalangan masyarakat sampai di desa-desa, dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat banyak.

Sesuai dengan keadaan sosial ekonomi dan budaya bangsa, pengembangan perbukuan di Indonesia perlu dilaksanakan dengan mengingat asas-asas:

- (a) **Tanggungjawab Bersama;** Masalah pengembangan perbukuan pada hakikatnya merupakan masalah pengembangan dan pemerataan kecerdasan kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya masalah pengembangan perbukuan merupakan unsur/bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan asas pembangunan, maka pelaksanaan pengembangan perbukuan merupakan tanggung jawab seluruh bangsa. Demi keserasian dan kelangsungan pelaksanaan tersebut perlu diatur dengan undang-undang.
- (b) **Terpadu;** Pengembangan perbukuan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, pengembangan perbukuan harus merupakan kepedulian pelbagai departemen dan instansi pemerintah, serta pelbagai golongan masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang perbukuan. Demi keselarasan dan untuk menghindari kegiatan tumpang tindih yang merugikan, penanganan pengembangan perbukuan nasional perlu dilaksanakan secara terpadu.
- (c) **Kemandirian;** Pengembangan perbukuan diarahkan untuk menjadi bidang yang berdiri sendiri dalam pola pembangunan nasional. Pelaksanaan pengembangannya diarahkan kepada terbentuknya suatu kondisi yang memungkinkan industri dan

perdagangan buku dapat berkembang atas dasar kekuatan sendiri.

- (d) **Desentralisasi**; Seirama dengan makin berkembangnya sarana dan prasarana perbukuan nasional termasuk kemampuan sumber daya manusia di bidang perbukuan, baik di pusat maupun di daerah, serta memperhatikan faktor-faktor geografis serta kemajemukan keadaan sosial budaya masyarakat, penanganan buku dan bahan pustaka lainnya, terutama buku untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan, secara bertahap dialihkan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.
- (e) **Profesionalisme**; Penanganan perbukuan sejak awal pengadaannya, sampai akhir penyebarannya perlu dilaksanakan secara profesional.
- (f) **Kualitas**; Pengembangan perbukuan nasional diarahkan kepada peningkatan mutu buku dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
- (g) **Prioritas**; Seirama dengan tuntutan pembangunan nasional dalam PJPT II prioritas pengadaan buku diarahkan pada pengembangan buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (h) **Ekonomis**; Pengembangan perbukuan dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat banyak.

Dalam menyongsong pelaksanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pertimbangan Pengembangan Perbukuan Nasional menyusun sebuah kertas kerja, dengan judul "Pengembangan Perbukuan Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II)" yang terurai dalam bab-bab sebagai berikut.

- I. Pendahuluan
- II. Kebutuhan akan Bahan Bacaan

- III. Keadaan Perbukuan Nasional pada akhir PJPT I
- IV. Arah dan langkah-langkah Pengembangan Perbukuan pada PJPT II
- V. Penutup

BAB II

KEBUTUHAN AKAN BAHAN BACAAN

Kecerdasan suatu bangsa di masa modern dapat diukur dengan banyaknya buku dan majalah yang tersedia untuk dibaca oleh bangsa yang bersangkutan. Bangsa kita merupakan bangsa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan mendiami wilayah yang sangat luas. Akan tetapi, hampir setengah abad sesudah negara Republik Indonesia didirikan, bahan bacaan dalam bentuk buku dan majalah yang tersedia untuk dibaca, dipelajari, dikaji, dinikmati, atau dijadikan sumber keterangan masih amat sedikit dibanding dengan jumlah penduduk yang sesungguhnya membutuhkan bahan bacaan.

Bahkan, jumlah penduduk yang semestinya membutuhkan bahan bacaan tapi belum menyadari adanya kebutuhan ini jauh lebih besar dari pada jumlah penduduk yang merasakan kebutuhan ini. Kebiasaan untuk membaca buku dan majalah masih belum tersebar di luar kota-kota di kepulauan kita yang terbentang luas dan di luar golongan-golongan tertentu di kota ini. Oleh sebab itu, di masyarakat kita kebudayaan membaca masih amat lemah.

Di toko-toko buku di kebanyakan kota kecil, walaupun ada toko-toko buku ini, cenderung hanya dijual buku-buku pelajaran dan buku-buku agama saja, sehingga kebanyakan anggota masyarakat kita tidak begitu mengetahui bahwa ada buku-buku yang lain dari pada buku pelajaran sekolah atau buku-buku agama.

Berkat kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, terutama dalam masa Orde Baru, di jalur pendidikan sekolah jumlah peserta

didik yang kini belajar di jenjang pendidikan dasar telah melebihi 32 juta siswa, jumlah peserta didik yang kini belajar di jenjang pendidikan menengah telah melebihi tiga juta siswa, dan jumlah peserta didik yang kini belajar di jenjang pendidikan tinggi telah mencapai sekitar dua juta mahasiswa. Di samping itu, pada jalur pendidikan luar sekolah jumlah peserta didik yang mengikuti semakin banyak. Jenis program pendidikan juga berkembang dengan sangat cepat. Sedang jumlah anggota masyarakat yang telah meninggalkan bangku sekolah dan telah memasuki dunia kerja tentu jauh lebih besar daripada jumlah anggota masyarakat yang masih berada di sekolah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik memerlukan buku pelajaran dan beraneka ragam buku lain yang mengandung informasi pengetahuan dan teknologi yang memperluas cakrawala pemikiran sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat. Semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin banyak buku yang dibutuhkannya, pada taraf pengetahuan yang juga semakin tinggi. Pada jenjang pendidikan menengah sudah mulai diperlukan majalah bacaan remaja, di samping buku. Pada jenjang pendidikan tinggi malah setiap bidang pengetahuan keahlian memerlukan terbitan berkala, atau majalah profesi, yang memungkinkan para tenaga pendidik, mahasiswa dan lulusan serta peminat lain dalam bidang pengetahuan keahlian yang bersangkutan mengikuti perkembangan di bidang pengetahuan keahliannya dan memungkinkan mereka menyebarluaskan hasil pemikiran mereka. Lagi pula, buku dan majalah tidak hanya diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sehari-hari di hampir semua bidang kegiatan, seperti bidang pertanian, industri, perdagangan, politik, perhubungan, pariwisata, agama, kesehatan, pertahanan-keamanan, dan banyak lagi bidang kegiatan lain, termasuk penggunaan waktu senggang.

Mutu budaya suatu bangsa juga diukur dengan memperhatikan karya-karya sastra yang telah dihasilkan oleh bangsa yang bersangkutan dan yang pada umumnya dalam bentuk cetakan disebarluaskan di kalangan para pembaca bangsa yang bersangkutan dan bahkan di kalangan pembaca bangsa-bangsa lain. Bangsa India dapat menampilkan Mahabharata dan Ramayana, bangsa Arab dan Parsi dapat menampilkan karya-karya Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan Umar Kayam, bangsa Inggris dapat menampilkan karya-karya Shakespeare, Adam Smith, Charles Dickens, dan Joseph Conrad, bangsa Perancis dapat menampilkan karya-karya Moliere, Voltaire, J.J. Rousseau, Balzac, dan Andre Malraux, bangsa Amerika dapat menampilkan karya-karya Thomas Jefferson, Mark Twain, Henry James, dan Theodore Dreiser, untuk menyebut beberapa bangsa dan beberapa karya sastra saja sebagai contoh.

Pengetahuan anggota-anggota bangsa Indonesia mengenai karya-karya tulisan ulung yang telah dihasilkan oleh penulis-penulis bangsanya sendiri masih sangat terbatas. Karya tulisan ulung yang disederhanakan untuk mudah dipahami oleh kebanyakan pembaca hampir tidak ada sedangkan terbitan karya-karya aslinya pun belum mencapai seluruh anggota masyarakat yang diharapkan menjadi pendukung kebudayaan bangsanya. Oleh sebab itu, kebutuhan bangsa Indonesia akan bahan bacaan sesungguhnya baru sedikit saja terpenuhi, sehingga bilamana kita sungguh-sungguh ingin menjadi bangsa yang berpengetahuan modern dan berbudaya masih amat banyak yang harus dilakukan dalam bidang perbukuan di tanah air kita.

BAB III

KEADAAN PERBUKUAN NASIONAL PADA AKHIR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP I (PJPT I) DAN PERMASALAHANNYA

Aspek-aspek yang dikembangkan dalam kebijaksanaan perbukuan nasional meliputi kegiatan *pengadaan*, *penyebarluasan*, *pemanfaatan*, dan *pengaturan*. Seluruh kegiatan tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam satu jaringan interrelasi.

A. Pengadaan

Cara pengadaan buku dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu penerbitan sendiri dan impor.

1. Penerbitan Sendiri

Dua aspek penting dalam kegiatan penerbitan adalah menyangkut pengadaan penerbitan dan proses penerbitannya. Keadaan dan permasalahan dalam kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pengadaan Penerbitan

1) Penulisan karangan asli

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penulisan karangan asli adalah langkanya sumber daya manusia sebagai penulis. Kelangkaan sangat terasa di bidang ilmu: filsafat (logika, teori ilmu pengetahuan), psikologi, antropologi, kimia, astronomi, astro fisika, hidrologi, oseanologi, statistik, kependudukan, informatika,

komunikasi, dan ilmu perpustakaan. Selain itu, sulit juga dicari penulis/ pengarang buku di bidang pendidikan politeknik dan pendidikan menengah kejuruan.

Guna lebih merangsang minat para penulis/pengarang di kalangan para pendidik, pemerintah telah mengeluarkan pelbagai kebijaksanaan antara lain:

- (a) bagi tenaga pengajar di perguruan tinggi dianjurkan menulis buku.
- (b) untuk para pendidik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Perbukuan mengadakan sayembara penulisan naskah. Hasil penulisan dapat dijadikan penambahan angka kredit untuk kenaikan pangkat.

Namun, kebijaksanaan tersebut belum berhasil memacu para pengajar untuk merangkul profesi menulis sebagai profesi sampingan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, imbalan jasa penulisan yang belum memadai dan perlindungan atas hak-hak penulis belumlah intensif.

Di kalangan para penulis/pengarang dewasa ini terdapat empat organisasi perkumpulan, yakni Peperindo, Wanita Pengarang Indonesia, Aksara, dan Ipindo. Namun antara organisasi-organisasi tersebut tampaknya kurang terjalin komunikasi dan koordinasi, sehingga sulit dicari suatu kesatuan dari pihak pengarang dan penulis ini, di samping belum mengadakan usaha-usaha yang bersifat peningkatan mutu dan perluasan wawasan anggotanya.

2) Penerjemahan

Jumlah penerjemah buku ilmu pengetahuan sangat terbatas, sehingga banyak mempersulit usaha penerbitan terjemahan buku ilmu pengetahuan. Seorang penerjemah buku ilmu pengetahuan di

samping dituntut untuk menguasai bidang ilmu yang diterjemahkan harus pula menguasai keterampilan penerjemahan. Dari sudut pandang penerjemah, saat ini profesi penerjemahan belum mapan, sebagai akibat adanya anggapan bahwa kegiatan penerjemahan merupakan "everybody's business" dalam arti siapa saja boleh menerjemahkan asal menguasai salah satu bahasa asing dan bahasa Indonesia. Pada saat ini penerjemah juga mempunyai asosiasi yang bernama "Himpunan Penerjemah Indonesia" (HPI).

Kendala-kendala lainnya dalam penerjemahan adalah kesulitan memperoleh izin penerbit atau pemegang hak cipta yang menuntut imbalan yang cukup tinggi dan harus dibayar tunai sebelum buku terjual. Buku-buku terjemahan yang pada umumnya buku tentang iptek pembacanya terbatas sehingga kurang penerbit yang berminat.

b. Penerbitan

1) Penerbit

Secara kuantitatif jumlah penerbit di Indonesia mengalami kenaikan. Namun, penyebarluasannya belum merata. Sampai saat ini jumlah penerbit di Indonesia ada sekitar 400 buah, termasuk dua BUMN. Sebagian besar telah menjadi anggota IKAPI dan pada umumnya berdomisili di pulau Jawa. Sebagian kecil berdomisili di Sumatera dan satu dua penerbit terpencar-pencar di bagian Indonesia Timur.

Dilihat dari macam/jenis buku yang diterbitkan, komposisi penerbit adalah sebagai berikut:

- penerbit buku sekolah = 65%
- penerbit buku agama = 15%
- penerbit buku perguruan tinggi = 15%
- penerbit buku lainnya = 5%

Permasalahan yang dihadapi dunia penerbitan saat ini, antara lain permodalan yang lemah, pengelolaan yang belum profesional dan kurangnya sarana penunjang untuk penerbit baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas. Misalnya, tenaga editor, ilustrator, dan desainer yang profesional masih sangat langka. Lembaga pendidikan dan latihan penerbitan masih sangat jarang. Satu-satunya lembaga formal untuk tingkat pendidikan program D III bidang penerbitan diselenggarakan di Politeknik UI.

2) Editor

Selama ini bidang penyuntingan belum cukup mendapat perhatian di kalangan penerbitan. Bahkan mungkin masih ada penerbit yang belum memiliki editor atau penyunting. Padahal peran editor dalam penerbitan sangatlah penting terutama dalam upaya menghasilkan buku yang bermutu. Dalam kondisi penerbitan sekarang ini kelemahan tersebut dapat dipahami namun dalam upaya menangani penerbitan yang lebih profesional perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

3) Ilustrator/Desainer

Kontribusi kalangan ilustrator/desainer kepada dunia perbukuan tidak diragukan lagi oleh semua pihak. Akan tetapi, karya ilustrator/desainer seringkali hanya dianggap sebagai pendamping karya penulis, sehingga terjadi ketidakseimbangan pendapatan antara ilustrator dan penulis. Di samping itu para penerbit memberikan honor kepada ilustrator bukan atas dasar royalti, akan tetapi dengan sistem membeli hasil karya tersebut, sehingga hak cipta ilustrator seketika itu menjadi hilang, dan beralih kepada penerbit yang membelinya. Para ilustrator tergabung dalam asosiasi yaitu Ikatan Ilustrator Indonesia.

4) Percetakan

Di Indonesia dewasa ini terdapat lebih kurang 6.000 percetakan dengan ukuran besar maupun kecil. Sebagian besar berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, dan Ujungpandang. Perusahaan percetakan tersebut terhimpun dalam wadah organisasi profesi yaitu Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia. Sedang pencetak surat kabar dan majalah tergabung dalam Serikat Grafika Pers (SGP).

Tentang lembaga pendidikan dan latihan grafika, sekarang ini ada 3 STM Grafika dan 1 ST Grafika milik Pemerintah di samping 5 STM Grafika Swasta. Tingkat Pendidikan Program D III ada 2 Akademi Grafika Swasta, 1 Politeknik UI Jurusan Grafika dan Penerbitan dan di samping itu ada Pusat Grafika Indonesia (Pus-grafin) Depdikbud yang menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Grafika jangka pendek. Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan grafika tersebut semuanya terkumpul di Pulau Jawa.

Kendala yang dihadapi oleh lembaga menengah dan akademi grafika ini adalah kualifikasi tenaga pengajar dan fasilitas praktek yang sangat minim. Akibatnya lulusan lembaga pendidikan tersebut pada umumnya belum siap pakai, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku belajar.

Dalam hal kualitas cetak, dewasa ini, hasil percetakan di Indonesia hampir dapat menyamai kualitas cetak di luar negeri walaupun belum dapat menjadi komoditi ekspor seperti yang dilakukan negeri maju.

5) Hasil terbitan

Selama 10 tahun terakhir jumlah judul buku baru yang terbit setiap tahun di tanah air kita hanya berkisar antara 3.000 sampai dengan 4.000 judul dengan tiras rata-rata sekitar 3.000 eksemplar

tiap judul. Dengan demikian, jumlah buku yang beredar setiap tahun hanyalah + 12 juta eksemplar. Bahkan dalam dua tahun terakhir ini tampak ada kecenderungan menurun, meskipun judul-judul buku pelajaran yang memperoleh surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tiras terbitnya menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan sampai ada yang melebihi 100.000 eksemplar tiap judul.

Jumlah buku yang beredar di Indonesia masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan apabila masyarakat pembaca yang fungsional diperkirakan mencapai kurang lebih 139,6 juta orang. Selain jumlah, mutu buku-buku yang diterbitkan pun masih belum memadai. Data hasil penilaian buku pelajaran terbitan swasta yang dilakukan Direktorat Sarana Pendidikan menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 1987 sampai dengan 1991, hanya sekitar 54% dari buku yang dinilai yang dinyatakan memenuhi syarat. Untuk saat ini, hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk mutu buku mengingat hampir separuh buku yang diterbitkan adalah buku-buku sekolah. Selain buku-buku, berbagai jenis majalah pun seperti majalah bacaan remaja, majalah profesi, dan jurnal masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun variasinya.

Khusus untuk buku pelajaran, penerbitannya dilakukan oleh Pemerintah dan penerbit swasta. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989 Pasal 34. Di bawah ini dapat dilihat data jumlah buku pelajaran dan buku perpustakaan yang telah diadakan oleh Pemerintah baik yang diterbitkan sendiri oleh Pemerintah maupun yang dibeli dari penerbit swasta selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).

Tabel I Pengadaan Buku Teks Utama

No.	Tingkat Pendidikan	Pelita						Jumlah
		III	M : B	IV	M : B	V (s.d. 1991)	M : B	
1.	SD	44.737.763	1 : 1,5	86.652.752	1 : 3	29.029.060	1 : 1	160.419.575
2.	SLTP	9.871.024	1 : 2	27.318.126	1 : 3,5	6.946.586	1 : 0,8	44.135.736
3.	SLTA	4.876.847	1 : 2	11.437.002	1 : 2,6	5.846.365	1 : 1	22.160.214
Jumlah		59.485.634		125.407.880		41.822.011		226.715.525

M : B = Ratio jumlah murid terhadap jumlah buku.

M = Murid

B = Buku

Tabel II Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah

No.	Tingkat Pendidikan	Pelita			Jumlah
		III	IV	V (s.d. 1991)	
1.	SD (Inpres)	104.487.750	62.410.418	30.529.613	241.516.981
2.	SLTP/SLTA	3.439.219	10.832.621	689.005	14.960.845
3.	Perguruan Tinggi	-	-	-	9.120.000

Dari rasio jumlah murid terhadap jumlah judul buku yang tertera pada Tabel I terlihat betapa kemampuan atau peran pemerintah dalam pengadaan buku pelajaran atau pun buku perpustakaan sekolah sangatlah terbatas. Dari sejumlah mata pelajaran yang diperlukan oleh murid SD sampai dengan SLTA, pemerintah secara rata-rata hanya mampu menyediakan sekitar 1 sampai dengan 3 judul saja. Keadaan ini masih jauh dari mencukupi.

Apabila kita bandingkan dengan kondisi sebelum dimulainya PJPT I, pengadaan buku-buku teks utama dan buku perpustakaan sekolah sudah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Hasil survai yang dilakukan antara tahun 1970 sampai dengan 1971 menunjukkan bahwa di kota besar dan kecil di propinsi yang masih

terbelakang, pada lebih dari 50 persen sekolah dasar yang diambil sebagai sampel tak seorang murid pun memiliki buku teks. Bahkan yang sudah di kelas 6 di mana buku teks amat esensial hanya 40 persen murid-murid di propinsi terbelakang memiliki sebuah buku. Di propinsi yang lebih maju hampir 70 persen murid SD, sedikitnya memiliki sebuah buku teks untuk satu mata pelajaran.

Di sekolah lanjutan, seperlima sekolah-sekolah tak seorang murid pun membawa buku teks ke sekolah pada hari survei dilaksanakan. Di propinsi yang lebih terbelakang hanya 54 persen dari sampel yang diambil mempunyai sebuah buku, dan hanya di sepertiga jumlah sekolah itu setiap murid memiliki sebuah buku.

Tabel III Pengadaan Buku Perpustakaan
(sampai dengan Tahun 1989)

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1.	Perpustakaan Nasional	980.000
2.	Perpustakaan Daerah	1.432.394
3.	Perpustakaan Umum	1.160.000
4.	Perpustakaan Keliling	546.000
Jumlah		4.118.394

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam lingkungan ASEAN (kecuali Brunai belum ada data) sebagai terlihat pada tabel berikut (Tabel IV) Indonesia dengan penduduk 174 juta lebih pada tahun 1988, koleksi Perpustakaan Nasional kita jauh ketinggalan.

Tabel IV Koleksi Buku Perpustakaan Nasional
Negara-negara ASEAN

No.	Nama Negara	Jumlah Koleksi Buku	Penduduk	Tahun
1.	Indonesia	980.000	174.677.951	1988
2.	Malaysia	772.208	16.901.000	1987

No.	Nama Negara	Jumlah Koleksi Buku	Penduduk	Tahun
3.	Philipina	752.250	61.971.000	1989
4.	Singapura	2.950.000	2.668.000	1989
5.	Muangthai	1.135.680	55.017.000	1989

Tabel V Pengadaan Buku Agama
(sampai dengan 1991)

No.	Jenis Buku	Jumlah	Jlh. Pemeluk Tahun 1985
1.	Kitab suci masing-masing agama		
	a. Agama Islam	14.135.577	142.516.000
	b. Agama Kristen Protestan	1.329.030	10.660.000
	c. Agama Kristen Katholik	1.245.957	5.084.000
	d. Agama Hindu	729.028	3.116.000
	e. Agama Budha	253.965	1.640.000
2.	Buku-buku pelajaran Agama dan tuntunan-tuntunan keagamaan		
	a. Untuk sekolah-sekolah agama/madrasah	20.643.266	
	b. Untuk sekolah-sekolah umum	12.055.030	

Dari Tabel V terlihat bahwa pengadaan buku-buku agama masih jauh dari mencukupi apabila memperhatikan populasi yang memerlukannya. Pengadaan buku-buku agama tersebut rata-rata baru sekitar 17 persen dari seluruh pemeluk agama.

2. *Impor*

Dalam rangka pengembangan dan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga sebagai bahan informasi, dan suplemen terhadap buku produksi dalam negeri, penggunaan buku-buku impor sangat diperlukan, terutama untuk kalangan peneliti dan pendidikan tinggi. Buku-buku iptek yang telah direkomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperoleh kebebasan bea masuk. Namun, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam

usaha mengimpor buku. Prosedur dan peraturan yang berlaku dirasakan berbelit-belit sehingga kurang menggairahkan usaha impor buku. Omzet perdagangan buku impor sangat terbatas, diperkirakan hanya sekitar US \$5.000. Permasalahan berikutnya adalah distribusi dan pengiriman buku-buku impor ke berbagai daerah yang menjadi beban pengimpor.

B. Penyebaran Buku dan Bahan Pustaka lainnya

Melihat kondisi geografi Indonesia seperti yang dikemukakan pada bab pendahuluan, dapat dimengerti bila penyebaran buku tidak merata, penyebaran buku itu sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit. Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi darat atau laut masih banyak dijumpai. Sampai saat ini masih kurang perusahaan (swasta) yang berminat bergerak dalam bidang jasa khusus pengiriman buku. Hal ini disebabkan karena permintaan pengiriman buku sangat terbatas dan hanya pada waktu tertentu (misalnya pengadaan proyek) dengan volume yang kecil, serta lokasi tujuan yang terpencar-pencar, sehingga biaya operasi sangat tinggi.

Penyebaran buku untuk saat ini dilakukan dengan:

- (a) menggunakan jasa angkutan barang dengan sistem tarif negosiasi antara perusahaan angkutan dengan pemakai jasa angkutan,
- (b) menggunakan jasa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang,
- (c) menggunakan jasa pos (khusus tujuan ibukota kecamatan), mengingat rata-rata ibukota kecamatan sudah memiliki kantor pos pembantu.

Tata niaga buku yang baik dan sehat adalah mengikuti pola sebagai berikut:

1. Penerbit ---> Toko buku ---> Konsumen, atau
2. Penerbit ---> Grosir ----> Toko buku ----> konsumen.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa tata niaga buku saat ini tidak sesuai dengan aturan tata niaga yang baik dan sehat seperti tersebut di atas.

Hal ini antara lain disebabkan karena:

- (a) Kebanyakan penerbit tidak menyalurkan bukunya melalui toko buku, tetapi langsung mendatangi sekolah-sekolah melalui tenaga-tenaga penjualnya yang tersebar sampai tingkat kota kecamatan dengan penawaran perolehan rabat yang menarik.
- (b) Toko buku masih belum mampu melaksanakan fungsinya khusus sebagai distributor buku kepada masyarakat.

C. Pemanfaatan Buku dan Bahan Pustaka lainnya

Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan telah terbukti bahwa tersedianya buku serta pemanfaatannya secara efektif dalam proses belajar-mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan akademik.

Kenyataan yang dihadapi dalam lembaga-lembaga pendidikan saat ini adalah:

- (a) Belum tersedianya buku-buku pelajaran dan perpustakaan secara memadai dalam hal jumlah maupun mutu, di jalur pendidikan sekolah dan lebih-lebih di jalur pendidikan luar sekolah.
- (b) Sarana dan tenaga pengelola yang terdidik untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum belum mencukupi. Perpustakaan sekolah dan perpustakaan universitas belum merupakan pusat kegiatan belajar maupun sumber belajar yang penting.

- (c) Proses belajar-mengajar masih menitikberatkan kepada transmisi fakta dari guru kepada peserta didik sehingga tidak mendorong kepada proses belajar eksplorati, yang menuntut pemanfaatan buku secara optimum.

Keseluruhan keadaan tersebut di atas tidak menciptakan peluang yang kondusif untuk menggunakan buku-buku sebagai sumber dalam proses belajar-mengajar. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk memanfaatkan buku-buku kurang dikembangkan sehingga dengan sendirinya tidak menumbuhkan minat baca.

D. Pengaturan Buku dan Bahan Pustaka lainnya

Penanganan masalah perbukuan melibatkan banyak lembaga baik pemerintah maupun swasta. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menerapkan asas-asas keterpaduan dan kerja sama, karena belum adanya undang-undang yang mengatur kerja sama antarlembaga yang terkait. Ketidakterpaduan antarlembaga terkait dalam penanganan perbukuan dapat terlihat dari uraian berikut:

1. Departemen Perindustrian

Pada hakekatnya usaha penerbitan buku merupakan suatu industri. Namun, sampai kini usaha penerbitan belum diakui sebagai suatu cabang industri tersendiri sehingga usaha penerbitan tidak dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi usaha industri, misalnya penggunaan jasa bank.

2. Departemen Keuangan

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengacu kepada buku murah yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya harga buku adalah adanya berbagai pajak, seperti PPN kepada percetakan waktu

menyerahkan buku kepada penerbit dan kepada toko kertas ketika menyerahkan kertas kepada percetakan. Kepres Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembebasan PPN bagi penjualan buku-buku tertentu ternyata belum dapat memecahkan persoalan tingginya harga buku secara tuntas.

3. Departemen Kehakiman

Pembajakan buku yang dirasakan sangat merugikan diharapkan semula dapat diatasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pembajakan buku masih berjalan terus bahkan lebih merajalela. Hal ini memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif oleh Departemen Kehakiman dan instansi-instansi lain yang terkait.

4. Departemen Perdagangan

Toko buku mempunyai peranan sangat penting dalam proses pengembangan perbukuan nasional. Oleh karena itu, pengembangan toko buku perlu didukung oleh berbagai kemudahan di antaranya pemberian status kepada toko buku sebagai usaha yang berdiri sendiri yang sampai saat ini belum terealisasi.

5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- (a) Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ada berbagai unit kerja yang menangani perbukuan mulai dari penulisan, penerjemahan, dan sekaligus penerbitan. Namun, penanganannya belum terkoordinasi dengan baik.
- (b) Penilaian dan pemilihan buku pelajaran tertentu dan buku perpustakaan sekolah negeri masih ditangani secara terpusat.

6. Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN)

Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) mempunyai tugas pokok menelaah secara nasional seluruh masalah perbukuan dengan jalan menilai serta memberikan saran dan pertimbangan guna dijadikan dasar bagi penentuan kebijaksanaan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang belum dapat diatasi.

7. Perbankan

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para penerbit buku adalah kurangnya modal dasar untuk bekerja. Sedangkan penggunaan jasa bank oleh penerbit tidak dimungkinkan karena buku tidak dapat dijadikan agunan kredit.

8. Departemen Perhubungan

Buku merupakan barang yang spesifik yang sangat diperlukan untuk kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk penyebaran buku perlu memperoleh kemudahan-kemudahan terutama dalam kebijaksanaan tarif pengangkutan buku. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa tarif angkutan yang ditetapkan hanyalah tarif angkutan penumpang sedangkan tarif angkutan buku dengan kendaraan angkutan umum masih diserahkan kepada pihak penyedia dan pengguna jasa.

9. Departemen Penerangan

Buku akan dirasakan manfaatnya apabila buku dapat menjangkau masyarakat luas. Namun, berbagai media informasi yang ada belum secara intensif memasyarakatkan buku.

10. Departemen Agama

Kenyataan menunjukkan bahwa buku-buku agama banyak diminati masyarakat. Namun, jumlah dan mutu buku-buku agama masih belum memadai.

11. Kejaksaan Agung

Peranan kejaksaan agung sangatlah penting dalam pengawasan isi buku. Namun, selama ini masyarakat belum banyak mengetahui tentang kriteria penilaian yang digunakan kejaksaan agung.

12. Masyarakat Perbukuan

Di kalangan masyarakat perbukuan masih belum tercipta dasar dan mekanisme bagi kerjasama seperti belum adanya kode etik antara penerbit dan pedagang buku, penerbit dan ilustrator, penyunting, dan sebagainya.

BAB IV

ARAH DAN LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN PERBUKUAN NASIONAL PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II (PJPT II)

A. Arah dan Sasaran Pengembangan

Dalam rangka usaha untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia, maka sumber-sumber bacaan, khususnya perbukuan perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutu, jumlah, dan pemanfaatannya serta harganya terjangkau oleh rakyat banyak. Untuk mencapai sasaran tersebut, prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pengadaan, penerbitan, peredaran, serta pemanfaatan sumber-sumber bacaan perlu dibina dan ditingkatkan secara terpadu. Dengan demikian akan didorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang gemar membaca. Selain itu, untuk menggairahkan pengembangan dunia perbukuan, maka kemampuan para pengarang/penulis, penerjemah, pustakawan, editor, ilustrator, desainer serta penjual buku perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu ditingkatkan pula penghargaan dan perlindungan atas hak-hak mereka.

B. Langkah-langkah Pengembangan

1. Pengadaan

Sesuai dengan arah pengembangan perbukuan nasional tersebut di atas, aspek yang mendapat perhatian khusus dalam peng-

adaan buku adalah peningkatan mutu, jumlah, dan pembinaan sarana dan prasana pengadaan dan penerbitan buku. Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pengadaan buku sesuai dengan arah dan sasaran pengembangan perbukuan seperti tersebut di atas dan juga sesuai dengan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

a. Penerbitan sendiri

1) Penulisan

- (1) Pembinaan potensi penulisan secara lebih teratur dan terarah perlu ditingkatkan, misalnya melalui kursus atau penataran dan workshop keliling. Selain itu, pengembangan kemampuan mengarang di setiap jenjang sekolah harus lebih ditingkatkan untuk mengarahkan dan membentuk kemampuan kognitif dan mengembangkan kreativitas yang diperlukan calon pengarang. Penulis-penulis yang dapat mengisi kekurangan buku-buku dalam bidang-bidang yang masih langka bukunya tetapi sangat diperlukan mendapat pembinaan dan dorongan secara intensif.
- (2) Penghargaan masyarakat umum terhadap penulis buku perlu terus ditumbuhkan, misalnya melalui penyelenggaraan sayembara penulisan buku nasional, lebih menggalakkan pemilihan penulis terbaik dalam suatu bidang tertentu, dan memberikan honorarium yang memadai kepada penulis.
- (3) Perlindungan terhadap hak-hak penulis dan peningkatan kesejahteraannya perlu lebih diintensifkan dan ditingkatkan untuk menjadikan profesi pengarang sebagai profesi yang menarik bagi masyarakat.
- (4) Organisasi perkumpulan penulis/pengarang yang ada perlu diperkuat untuk memacu perkembangan penulisan.

2) Penerjemahan

- (1) Pembinaan dan penyuluhan bagi para penerjemah/penyadur perlu dilakukan secara teratur dan lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui organisasi profesi penerjemahan. Untuk itu Pemerintah perlu membantu organisasi profesi ini dalam melaksanakan program-program kerjanya.
- (2) Pemerintah bersama-sama masyarakat perlu menyediakan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan penerjemahan/penyaduran buku-buku yang diperlukan, terutama imbalan yang menarik bagi penerjemah/penyadur sehingga dapat bersaing dengan kegiatan lain dalam upaya menarik tenaga-tenaga yang baik.
- (3) Pemerintah bersama para penerbit dan penerjemah menyusun prioritas bidang-bidang ilmu serta daftar buku yang perlu diterjemahkan/disadur, serta mengadakan inventarisasi buku-buku yang telah diterjemahkan/disadur.
- (4) Buku-buku yang diterjemahkan/disadur seyogyanya adalah buku-buku yang bermutu, berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sarannya cukup luas, serta isi dan kegunaannya dapat bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama.
- (5) Pemerintah mengupayakan kemudahan-kemudahan memperoleh ijin dan hak penerjemahan/penyaduran.
- (6) Penerjemahan/penyaduran buku dapat dikelola oleh penerbit dengan berpatokan pada prioritas yang ditetapkan.
- (7) Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) perlu diperkuat untuk memacu perkembangan penerjemahan.

3) Penerbitan

- (1) Penataan dan peningkatan usaha penerbitan secara kualitatif dan kuantitatif serta merata ke seluruh Indonesia perlu diupa-

yakan dengan saksama. Pembinaan kualitas dan kuantitas penerbit supaya ditingkatkan dengan penyelenggaraan workshop, seminar, dan kegiatan serupa secara intensif, terutama di daerah.

- (2) Kondisi yang serasi dan kondusif dalam usaha penerbitan buku perlu diciptakan. Pemerintah hendaknya dapat menyediakan kemudahan-kemudahan dalam usaha penerbitan, mulai dari fasilitas kredit lunak, keringanan bea masuk bagi bahan baku buku dan pencetakan.
- (3) Pembinaan profesi-profesi yang terkait dalam usaha penerbitan, yaitu editor, ilustrator, dan desainer secara lebih teratur dan terarah perlu ditingkatkan serta perlindungan atas hak-haknya harus terus diintensifkan.
- (4) Upaya menumbuhkan kemampuan penerbit dan pencetak di daerah harus terus dikembangkan, misalnya dengan desentralisasi penerbitan dan pencetakan buku-buku pelajaran.
- (5) Pengadaan buku-buku pelajaran dan perpustakaan perlu lebih ditingkatkan jumlah dan mutunya.
- (6) Penerbitan majalah remaja, majalah profesi, majalah berkala, buku-buku iptek, buku agama, buku-buku keterampilan, dan buku-buku karya sastra ulung perlu didorong perkembangannya.
- (7) IKAPI perlu diperkuat untuk lebih memacu perkembangan penerbitan nasional.

b. Impor

- (1) Prosedur impor buku dan majalah yang diprioritaskan perlu disederhanakan, serta kemudahan kredit untuk importir buku.
- (2) Impor buku perlu mendapat prioritas dengan mempertimbangkan bidang, mutu buku, dan kelompok pembaca sasaran.

- (3) Pembinaan kemampuan importir buku dalam kemandirian dan bonafiditas perlu diupayakan dengan menyediakan forum komunikasi antara pemerintah, importir buku, distributor, dan pemakai.

c. Sumbangan

- (1) Pengadaan buku-buku yang diperlukan melalui sumbangan dari luar negeri perlu ditingkatkan jumlah, mutu, dan variasinya.
- (2) Pengkoordinasian pengadaan dan pemanfaatan buku sumbangan perlu ditingkatkan.

2. Penyebaran

Untuk mengatasi ketidakmerataan penyebaran buku perlu diupayakan hal-hal berikut:

- (a) Jalur distribusi buku perlu disederhanakan dan bagi peran pelaku distribusi buku perlu diadakan pengaturan yang mengarah pada pemantapan peranan toko buku.
- (b) Kesempatan untuk tumbuhnya toko-toko buku sampai ke daerah-daerah perlu didorong pemerintah pusat maupun daerah, misalnya dalam memberikan kesempatan menggunakan jasa bank, kesempatan berusaha, dan pelatihan pengelola toko buku.
- (c) Adanya suatu Pusat Informasi Terpadu di bidang perbukuan, perlu diupayakan.
- (d) Pemerintah dan masyarakat perbukuan perlu secara bersama-sama mengupayakan adanya pasar induk buku di tiap propinsi.
- (e) Ekspor buku ke luar negeri perlu diusahakan.

- (f) Penerbit dan toko buku diberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan gudang-gudang pemerintah yang berjumlah 286 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Pemanfaatan

Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan buku-buku perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pemasyarakatan buku melalui media elektronik maupun cetak, dan sistem nasional jaringan perpustakaan yang dapat menjangkau sebanyak mungkin rakyat perlu terus dibina dan dikembangkan. Perpustakaan-perpustakaan sekolah dasar maupun sekolah menengah juga perpustakaan desa perlu lebih dikembangkan. Demikian pula bentuk-bentuk perpustakaan yang mendekatkan buku kepada masyarakat seperti perpustakaan desa, perpustakaan keliling, serta perpustakaan di tempat ibadah, perlu lebih digalakkan.
- (b) Mengembangkan kurikulum dan buku pelajaran yang akan menciptakan proses belajar mengajar yang eksploratif atau secara fungsional melibatkan perpustakaan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar demikian peserta didik didorong untuk mencari sendiri informasi yang diperlukan dari berbagai sumber, terutama buku. Hal ini diharapkan akan mengembangkan budaya baca masyarakat.
- (c) Mengadakan buku-buku dengan jumlah yang memadai. Dana untuk pengadaan buku-buku di perpustakaan sekolah dan lainnya perlu diupayakan dan ditingkatkan.
- (d) Meningkatkan kualitas buku dalam berbagai aspeknya melalui peningkatan pembinaan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan buku.

- (e) Mengikutsertakan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan budaya baca, seperti gerakan Pramuka, Organisasi Wanita, karang Taruna, gerakan PKK, dan sebagainya termasuk lingkungan keagamaan melalui perpustakaan di tempat-tempat ibadah.
- (f) Melakukan kampanye meningkatkan budaya baca melalui berbagai media massa, ceramah-ceramah, pameran buku, dan mobil buku keliling.
- (g) Perpustakaan sekolah perlu diadakan di setiap sekolah dan pengelolanya diberikan pembinaan yang memadai. Selain itu, upaya melengkapi perpustakaan sekolah dengan buku-buku yang bermutu, bervariasi dan jumlah yang memadai harus terus ditingkatkan.
- (h) Tugas perpustakaan umum diperluas agar aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan membawa buku kepada masyarakat dan sebaliknya membawa masyarakat kepada buku melalui cara-cara seperti mengadakan lomba membaca, lomba ceritera, demonstrasi, kepandaian/keterampilan dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan penggunaan buku yang tersedia sampai ke desa-desa.
- (i) Guna menjamin penyelenggaraan perpustakaan yang berhasil-guna sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pembinaan dan pengembangan perpustakaan perlu diatur dengan undang-undang.
- (j) Perpustakaan Nasional perlu dimantapkan, baik fisik maupun nonfisik, agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal.
- (k) Usaha pemantapan pembinaan Perpustakaan Daerah perlu diteruskan agar mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai UPT di bidang pelayanan perpustakaan dan sebagai pembina

pembantu Perpustakaan Nasional bagi masing-masing daerahnya.

- (l) Koordinasi pembinaan Perpustakaan Umum antara Perpustakaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri perlu dimantapkan.
- (m) Mengupayakan agar harga buku terjangkau oleh masyarakat antara lain dengan pengaturan perpajakan terhadap komponen produksi buku yang mendukung.

4. Pengaturan

- (a) Untuk kelancaran pengembangan perbukuan nasional, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat prasarana yang perlu diwujudkan terlebih dahulu adalah adanya kebijaksanaan nasional tentang perbukuan di Indonesia yang komprehensif dan terpadu, antara lain melalui Undang-Undang Perbukuan yang akan menjadi dasar hukum untuk segala kegiatan bidang perbukuan serta pembagian tugas yang wajar antara pemerintah dan masyarakat perbukuan. Dalam kaitan ini tugas dan fungsi BPPBN perlu ditingkatkan.
- (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 telah menggariskan pembagian tanggung jawab dalam pengembangan buku pelajaran dan memberikan ketentuan tentang keterlibatan pemerintah dalam proses penyusunannya. Untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tersebut dengan baik, perlu dibuat peraturan pemerintah yang lebih operasional dan lebih rinci yang dapat dijadikan landasan hukum untuk pengaturan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Penentuan buku-buku pelajaran yang akan ditangani pemerintah maupun swasta.

2. Mekanisme kerja pengadaan, penerbitan, dan penyebaran buku baik oleh pemerintah maupun swasta yang dapat menjamin tersedianya buku dengan cepat dan dapat pula menjamin pencapaian standar pendidikan nasional.

BAB V

PENUTUP

Masyarakat masa depan adalah masyarakat belajar. Berarti suatu masyarakat yang memerlukan sumber belajar yang cukup serta berbudaya baca yang tinggi. Selain itu masyarakat masa depan merupakan suatu masyarakat dunia yang terasa semakin menyatu karena pengaruh globalisasi. Dalam dunia semacam itu, setiap warga negara dituntut untuk terus menerus memperkaya kepribadiannya, baik untuk memperkuat jati dirinya sebagai manusia Indonesia, juga sebagai warga dunia yang rentan terhadap arus modernisasi dalam rangka mewujudkan kehidupan umat manusia yang lebih adil dan beradab.

Masa depan masyarakat Indonesia yang akan memasuki masyarakat modern memerlukan anggota masyarakat yang terus-menerus menambah ilmu pengetahuannya. Sumber-sumber ilmu pengetahuan dan informasi di masa depan akan sangat beragam terutama sumber-sumber informasi elektronika. Walaupun demikian, sumber informasi berupa buku tetap merupakan sumber primer khususnya untuk kepentingan pendidikan.

Selain itu sumber informasi dari buku tetap mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan sumber belajar elektronika, khususnya dalam proses belajar-mengajar pada jenjang pendidikan dasar.

Lampiran:**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BPPBN**

No.	Nama/Jabatan Struktur/Alamat	Jabatan dalam BPPBN
1.	Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. Taya Paembonan Kepala Pusat Perbukuan - Depdikbud Jl. Gunung Sahari (Eks Kompleks Siliwangi) Jakarta 10002	Sekretaris merangkap anggota
3.	Drs. Soekarman, MLS Sekretaris Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta	Anggota
4.	Prof. Dr. Ihromi, MA Wakil Masyarakat Jl. Dempo 14 - Matraman Jakarta	Anggota
5.	Drs. Soepojo Padmodipoetro, MA Wakil Masyarakat Kompleks Depdikbud Jl. Idhata No. 18 - Kemanggisan Jakarta Barat	Anggota
6.	Dr. Ir. M. Hadi Soesatro, Dip. Ing. Centre for Strategic and International Studies Jl. Tanah Abang III/27, Jakarta	Anggota
7.	Drs. Soetojo Gondo Wakil Masyarakat Jl. Minangkabau No. 40, Jakarta	Anggota
8.	H. Machmoed Ketua Gabungan Toko Buku Indonesia Jl. Pangkalan Jati VI Jatiwaringin Raya Jakarta	Anggota
9.	Drs. H. Oesman Rahman Ketua Himpunan Penterjemah Indonesia Jl. Semarang No. 12, Jakarta	Anggota

No.	Nama/Jabatan Struktur/Alamat	Jabatan dalam BPPBN
10.	Drs. H. Hasbullah Mursyid Kepala Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama Jl. H. Thamrin No. 6, Jakarta	Anggota
11.	Drs. Bastomi Ervan Sekretaris Dirjen Kebudayaan Depdikbud Jl. Cilacap No. 4, Jakarta	Anggota
12.	Prof. Dr. Yuhara Sukra Direktur Pendidikan Tinggi Swasta Ditjen Dikti - Depdikbud Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta	Anggota
13.	Prof. Dr. Conny R. Semiawan IKIP Rawamangun Jakarta	Anggota
14.	Drs. F. Sitanggang Kepala Pusat Grafika Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.42-43 Jakarta	Anggota
15.	Ir. Moh. Mansoer Direktur Industri Selulosa dan Karet Ditjen Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta	Anggota
16.	Drs. M. Yohad Hardjosumitro Kepala Pusat Penyuluhan Perpajakan Ditjen Pajak - Depkeu RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta	Anggota
17.	Luwarsih Pringgodisurjo, MA Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta	Anggota
18.	Rozali Usman, S.H. Ketua Umum Pengurus Pusat IKAPI Jl. Kalipasir 32 Jakarta	Anggota

No.	Nama/Jabatan Struktur/Alamat	Jabatan dalam BPPBN
19.	Prof. Dr. H.A.R. Tilaar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati No. 1, Jakarta	Anggota
20.	Drs. H. Achmad Djazuli Direktur Sarana Pendidikan Depdikbud Jl. Hang Lekir II/16 - Keb. Baru Jakarta Selatan	Anggota
21.	Abbas Moh. Galung, S.H.,MH,S.E. Kepala Bag. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi/Perpustakaan Bea dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta	Anggota
22.	Mukhlis Rasyid Kepala Urusan Kredit Umum Bank Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 76, Jakarta	Anggota
23.	Mastini Hardjoprakoso, MLS Kepala Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta	Anggota
24.	I Gusti Ngurah Ardha K. Inspektur Kepegawaian Itjen Depdikbud Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta	Anggota
25.	Drs. Zakaria Idris Direktur Utama Perum Balai Pustaka Jl. Gunung Sahari (Eks Kompleks Siliwangi) Jakarta	Anggota
26.	Kuntoro, S.H. Staf Ahli Menpan Bidang Hukum Jl. Veteran III, Jakarta	Anggota
27.	Drs. Sumarwati Meinara Kepala Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Balitbang Penerangan - Deppen Jl. Merdeka Barat No. 9 Jakarta	Anggota

No.	Nama/Jabatan Struktur/Alamat	Jabatan dalam BPPBN
28.	J.M. Kara, S.H. Kepala Direktorat Sosial Politik Bidang Intelijen - Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan	Anggota
29.	Ny. S. Mochtar, S.H. Kepala Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Biro Hukum Departemen Perdagangan Jl. Ir. Juanda No. 36, Jakarta	Anggota
30.	Salikin S. Wardoyo Wakil Masyarakat Jl. Kav. DPR 3A/17 - Grogol Selatan Kebayoran Lama, Jakarta	Anggota
31.	Suganda Persatuan Pengusaha Grafika Indonesia Jl. Bangka Ilc/3, Jakarta	Anggota
32.	Ny. Titi Said Organisasi Wanita Pengarang	Anggota
33.	Dr. Ir. Hidayat Sjarif Kepala Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas Jl. Taman Suropati No. 1, Jakarta	Anggota

XI.

Perpustakaan
Jenderal

ISBN 979 462 414 4